



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNDIRI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGADAAN, PERLENGKAPAN DAN FASILITAS PERSIDANGAN, ARSIP DAN EKSPEDISI**
3. NHK : **112638**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.217.600.000
1. Tanah Seluas 176 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI	Rp.	17.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/136 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI	Rp.	1.200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	149.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI	Rp.	4.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	20.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	125.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	47.966.833
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.438.566.833
III. HUTANG	Rp.	163.792.733
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.274.774.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.